BANYAK PROGRAM TAK BISA DIJALANKAN

Apdesi Desak Presiden Cabut Peraturan Menkeu

BAMBANGLIPURO (KR) - Terbitnya Peraturan Menkeu No 50/PMK.07/2020 mengakibatkan sejumlah program strategis desa sulit dilaksanakan. Peraturan itu mewajibkan Pemdes di seluruh Indonesia mengalokasikan anggaran Dana Desa untuk BLT-DD tahap 4,5 dan 6 dengan besaran Rp 300 ribu/bulan selama 3 bulan.

Jika itu diterapkan otomatis program vital desa seperti pencegahan stunting, penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Pemberian Makanan Tambahan (PMT) balita dan lansia sulit dijalankan setelah dana terserap untuk BLT DD. Hal ini ditegaskan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPC Apdesi) Kabupaten Bantul, Dra Ani Widayani, Kamis (11/6).

Diungkapkan, jika BLT DD tahap 4, 5 dan 6 masih menjadi bahan diskusi. Karena desa di Bantul masih banyak warga yang sama sekali belum tersentuh bantuan apapun. "Hal tersebut sudah pasti menjadi 'PR' bersama. Bagaimana caranya mereka itu juga mendapatkan hak sama," ujar Ani.

Kondisi seperti itu menjadi awal timbul kecemburuan di masyarakat. Selain itu, dana desa jumlahnya terbatas dan sudah dipergunakan untuk penyaluran tahap BLT DD tahap pertama. Sedang merujuk surat edaran Menteri Desa No 4 dan No 8 adalah, DD tahap pertama untuk penanganan Covid-19 dan kedua untuk padat karya tunai. "Kita sudah jelaskan maksud dari Apdesi ingin agar Presiden mencabut PMK terkait BLT-DD tahap ke 4,5 dan 6. Apdesi juga berhak menyuarakan aspirasinya," ujarnya.

Ani menegaskan, jika pemberian BLT-DD tahap 4,5 dan 6 menggunakan dana desa tahap ke 3 sebanyak 20 %, bisa dipastikan pemerintah desa tidak bisa menjalankan program karena dana desa tahap 1 dan 2 sudah digunakan untuk penanganan Covid-19.

"Jika dana desa tahap ke 3 sebesar 20 % untuk BLT-DD tahap 4,5 dan 6, maka desa tidak bisa melaksanakan program untuk pengentasan stunting, pembuatan MCK, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) hingga pendidikan," ungkapnya.

Menurut Ani, penanganan stunting merupakan salah satunya program wajib yang mesti dilaksanakan seperti aturan dari Kementerian Desa PDTT. Ketika dana desa tahap 3 untuk BLTD-DD 4,5 dan 6, artinya tidak ada lagi program yang bisa dijalankan.

Sementara itu, Bupati Bantul Drs H Suharsono menegaskan penyaluran dana bantuan sosial (bansos) yang didistribusikan ke warga diharapkan tepat sasaran. Selain itu, perangkat desa diharapkan mengawasi secara benar distribusi bansos ini. "Jangan sampai ada penyimpangan apalagi pemotongan dana bansos. Lurah desa mohon ekstra melakukan pengawasan, utamanya pendistribusian bansos. Bansos harus diterima utuh tanpa potongan," jelasnya usai memberikan bantuan bantuan bansos senilai Rp 600 ribu di Desa Srimartani, Srimulyo dan Sitimulyo Kecamatan Piyungan, kemarin.

Adapun daftar penerima bantuan sosial di desa ini ada 119 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang bersumber dari APBD DIY dan 317 KPM yang bersumber dari Dana Desa (DD).

Sekda Bantul, Helmi Jamharis, menambahkan sesuai Permenkeu bahwa pemerintah desa harus mengalokasikan Dana Desa (DD) dari APBN untuk dimanfaatkan dalam penanganan Covid-19. Dana ini diperuntukkan bagi pendirian rumah karantina, pemenuhan hand sanitizer dan disinfektan serta program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi KK miskin yang merupakan Jaring Pengaman Sosial (JPS). **(Roy/Aje)-f**

MEMILIH DISIMPAN DI BPKH

Dana Pelunasan Haji Tidak Diambil

BANTUL (KR) - Jemaah Calon Haji (Calhaj) Tahun 1441 H/2020 M yang dibatalkan pemberangkatannya karena pandemi Covid-19, tak ada yang mengambil dana pelunasan sebesar Rp 10 juta. Menurut Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kemenag Bantul, Ahmad Mustafid, hingga Kamis (11/6) kemarin belum ada satupun calon haji yang mengambil dana pelunasan.

Dijelaskan, setoran pelunasan biaya haji 1441 H/2020 M akan disimpan dan dikelola secara terpisah oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Nilai manfaat hasil pengelolaan akan diberikan secara penuh kepada jemaah, paling lambat 30 hari kerja sebelum pemberangkatan kloter pertama pada penyelenggaraan ibadah haji 1442 H / 2021 H.

Tapi jika setoran pelunasan akan diambil, bisa melampirkan bukti asli setoran pelunasan biaya haji 1441 H/2020 M, fotocopi buku tabungan haji dan fotocopi KTP. "Tapi hingga sekarang tidak ada calhaj yang mengambil setoran pelunasan tersebut," ungkap Ahmad Mustafid.

Sementara salah seorang calon haji yang dibatalkan pemberangkatannya, Sukamto SPd yang juga Kabag Kesra Bantul, memilih tidak mengambil setoran pelunasan haji sehingga tidak merepotkan petugas. "Selain itu juga saya merasa tenang, karena pada saat pemberangkatan haji tahun 1442 H/2021 mendatang, sudah tidak lagi memikirkan uang pelunasan lagi," tuturnya.

Karena uang pelunasan disimpan di BPKH, maka pada pemberangkatan tahun depan. Jika biaya haji ada kenaikan tinggal menambah kekurangan, jika masih sama tidak perlu mencari biaya tambahan. "Bahkan kalau ada kelebihan nilai kemanfaatan bisa untuk tambahan uang saku. **(Jdm)-f**

Warga Pajangan Hasilkan Ribuan DOC Ayam 'Joper'

BANTUL (KR) - Dirintis tahun 2012, kelompok Anak Gunung (Anggun) Farm di Dusun Beji Kulon Desa Sendangsari Pajangan, telah berkembang pesat. Bahkan sekarang ini dalam sebulan kelompok tersebut sanggup memproduksi 100 ribu lebih Day Old Chicken (DOC) atau bibit ayam Jawa Sudah Disilangkan atau Jowo Super (Joper). Pasarannya setelah 8 tahun dirintis selain DIY sudah merambah Jawa tengah.

KR-Sukro Riyadi

Proses inseminasi buatan pada ayam petelur di Beji Kulon Sendangsari Pajangan Bantul.

Ketua Kelompok Anggun Farm Pajangan Bantul, Sutardi, Kamis (11/6), mengaku sebelumnya orangtuanya beternak ayam petelur untuk menopang kebutuhan keluarga. Namun ia melihat usaha ayam petelur sangat dipengaruhi kondisi pasar. Sehingga lelaki bersahaja tersebut berusaha mengembangkan usaha baru yang lebih berprospek.

Kemudian tahun 2012 dimulailah pendirian kelompok Anggun Farm di Dusun Beji Kulon Sendangsari Pajangan. Pada awal berdirinya, tahun 2012 ayam indukan dan pejantan jumlahnya terbatas. Sedang mesin tetasnya berkapasitas diangka 30 ribu.

"Saya merasakan tahun 2015 usaha pembibitan ayam Jawa Super yang kami rintis mengalami perkembangan yang sangat pesat, waktu itu ayam Jawa Super mulai dikenal. Kemudian tahun 2017 mendapat proyek pemerintah," ujar Sutardi.

Memasuki usianya yang ke-8, kelompok Anggun Farm Pajangan terus maju. Jumlah ayam jantan mencapai 400 ekor, sedang ayam betina atau petelur sudah menembus angka 26 ribu ekor. "Kapasitas mesin dikelompok kami saat ini mencapai 240 ribu," ujarnya.

Dijelaskan untuk menjadikan 1 ekor DOC 'Joper', prosesnya cukup panjang. Dimulai pengambilan sperma dari ayam jantan. Setelah itu inseminasi buatan dilakukan dengan ayam petelur. Sehingga nanti telur yang sudah dihasilkan sudah 'Joper'.

"Sperma ayam jantan Jawa diambil oleh petugas inseminator kemudian nanti IB di lakukan pada setiap ekor ayam," ujarnya. Tahap selanjutnya telur diambil dan dimasukkan ke mesin tetas untuk menghasilkan DOC 'Joper'.

Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan (DPPKP) Bantul, Ir Joko Waluyo ST MSi, mengatakan kelompok Anggun Farm Pajangan merupakan aset berharga bagi Pemda Bantul. Karena usaha yang dirintis secara kelompok tersebut sudah mampu mensuplai kebutuhan bibit ayam 'Joper' di DIY bahkan di Jawa Tengah dan sekitarnya. **(Roy)-f**

Kuliah Daring, UMY Hemat Listrik 70%

BANTUL (KR) - Wabah Covid-19 yang diikuti dengan kuliah dalam jaringan (daring) mempengaruhi penggunaan listrik di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Hal ini bisa dilakukan karena sejak berlakunya masa darurat Covid-19 bulan Maret lalu, UMY membuat skenario *hybrid learning*.

"Ini merupakan bentuk upaya konservasi dan efisiensi kami dalam penggunaan energi listrik di kampus selama masa pandemi Covid-19 sehingga menjadi hemat biaya dan hemat energi. Dalam masa pandemi saat ini penghematan biaya listrik mencapai 70% dan penghematan setara dengan 15% biaya operasional UMY pertahun," kata Rektor UMY, Dr Ir Gunawan Budiyanto MP IPM pada acara Webinar Universitas Indonesia Green Metric Indonesia seri ke-5, Kamis (4/6).

Gunawan mengungkapkan upaya penghematan energi yang sudah dilakukan di UMY antara lain adalah penggunaan AC dan penerangan pada ruang kelas yang sudah tidak ada dan pada gedung perkantoran intensitas penggunaannya yang semakin berkurang. Tak hanya itu, wujud efisiensi di UMY yaitu dengan cara audit energi berkala, penggunaan peralatan hemat energi, pemasangan kapasitor bank dan analisis pemasangan filter aktif.

"Pengelolaan energi listrik menjadi salah satu hal penting untuk konsisten mengurangi krisis pemanasan global, khususnya bagi kalangan universitas yang pada umumnya menggunakan energi listrik yang cukup besar," tuturnya.

Agar aktivitas belajar daring dapat tetap bertahan dan berkelanjutan, maka perlu inisiasi dalam penerapan kuliah online. Oleh karena itu, UMY mengembangkan MyKlass sebagai platform belajar daring yang sudah digunakan sejak tahun 2016. **(Fsy)-f**

SUMBERAGUNG SASARAN TMMD REGULER

Bangun Jembatan Tunjang Perekonomian Desa

BANTUL (KR) - Kalurahan Sumberagung Jetis Bantul tahun anggaran 2020 ini menjadi sasaran TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-108 dengan kegiatan fisik membangun jembatan penunjang perekonomian desa. Panjang jembatan 12 meter, lebar 3 meter, yang lokasinya di Pedukuhan Pangkah.

Menurut Perwira Seksi Teritorial (Pasiter) Kodim 0729 Bantul, Kapten CAJ Herwanto, Kamis (11/6), karena saat ini masih dalam kondisi pandemi Covid-19, sehingga realisasi pengerjaan pembangunan jembatan sasaran TMMD, sejak pra hingga akhir kegiatan, semua petugas wajib melaksanakan protokoler kesehatan. Yakni wajib memakai masker, menjaga jarak, menjaga kebersihan, memperhatikan suhu tubuh dan lainnya.

"Dengan pelaksanaan protokoler, sedikit banyak akan mengurangi kelancaran pekerjaan, tapi ditarget TMMD di Barongan yang diawali dengan pra TMMD awal Juni dan dibuka 30 Juni 2020 akan selesai minggu ke 4 Juli 2020," jelas CAJ Hermanto.

Karena pada pembukaan TMMD masih dalam pandemi Covid- 19, sehingga tidak diadakan upacara pembukaan seperti pada pelaksanaan TMMD sebelumnya. Sedangkan jumlah personel yang dilibatkan setiap hari sebanyak 150 orang, meliputi dari Satgas 15, tim asistensi 25 orang, Kodim 0729 Bantul, 22 orang, Yon Armed 3/105 53 orang dan personel lainnya.

Dikatakan CAJ Hermanto, TMMD ini bertujuan untuk mewujudkan semangat juang dan kemanunggalan TNI-Rakyat yang tangguh dan membantu Pemkab Bantul dengan melaksanakan giat secara terpadu dan terintegrasi bersama masyarakat melalui pembangunan secara fisik. **(Jdm)-f**

Bupati Sambangi Petani Cabai

KRETEK (KR) - Bupati Bantul Drs H Suharsono menyambangi petani cabai di Baros Tirtohargo Kretek Bantul, Rabu (10/6) sore. Kedatangan orang nomor satu di Kabupaten Bantul tersebut setelah mendapat kabar jika harga jual cabai jatuh. Namun untuk sekarang wilayah tersebut belum masuk masa panen.

Ketua Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Bantul, Suroto, mengatakan memang harga jual sekarang ini rendah. Harapannya, kedepan meningkat bisa lebih dari yang sekarang ini. "Kalau sekarang ini kan kisaran Rp 4.000, dengan harga itu petani sama sekali tidak akan untung. Ongkos petik saja tidak akan nutup itu," ungkapnya.

KR-Sukro Riyadi

Suroto (kiri), menjelaskan kondisi tanaman cabai ke bupati.

Suroto mengatakan, sekarang ini mayoritas tanaman lombok merupakan hasil tumpang sari dari tanaman bawang merah. Sehingga pada bulan-bulan ini sebelum memasuki masa panen raya. "Sekarang memang sudah berbuah tapi baru bisa dipanen paling tidak satu bulan lagi," ujar Suroto.

Terkait dengan jumlah luasan tanaman cabai, musim tanam (MT) 1 tidak terlalu banyak. Khusus wilayah Sanden kisaran 10 hektare, sedang di Kretek bisa mencapai 40 hektare. **(Roy)-f**

TAHUN AJARAN BARU TIDAK BERUBAH

Tatap Muka Tunggu Pandemi Covid-19 Mereda

MESKI pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) masih terjadi, namun proses pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2020 tetap dimulai. Artinya sistem pembelajaran akan segera masuk Tahun Ajaran Baru 2020/2021. Tidak ada pengunduran waktu tahun ajaran baru, apalagi berubah menjadi awal tahun 2021.

Plt Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah (Plt. Dirjen PAUD Dasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Hamid Muhammad menegaskan bahwa ada perbedaan antara dimulainya Tahun Ajaran Baru dengan tanggal dimulainya Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) untuk tatap muka.

"Tanggal 13 Juli adalah tahun pelajaran baru, tetapi bukan berarti kegiatan belajar mengajar tatap muka. Metode belajar akan tergantung perkembangan kondisi daerah masing-masing," jelas Hamid.

Lebih lanjut, Hamid mengatakan bahwa kalender pendidikan Indonesia dimulai pada minggu ketiga bulan Juli dan berakhir pada akhir bulan Juni. "Dengan dimulainya PPDB ini sebenarnya sudah jelas bahwa kami tidak memundurkan kalender pendidikan ke bulan Januari. Kenapa tidak memundurkan? Karena kalau memundurkan maka akan ada konsekuensi yang harus kita sinkronkan," ungkap Hamid.

Hamid menambahkan, konsekuensi pertama adalah peserta didik untuk tingkat SMA dan SMP yang sudah dinyatakan lulus. "Kelulusan siswa SMA dan SMP sudah diumumkan, sebentar lagi akan diumumkan untuk kelulusan siswa SD. Artinya kalau sudah lulus kemudian diperpanjang, anak yang lulus ini mau dikemanakan? Termasuk juga perguruan tinggi juga sudah melakukan seleksi," ujar Hamid.

Sejalan dengan itu, Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, Chatarina Muliana Girsang mengemukakan, hal yang mungkin menjadi masalah dalam PPDB metode luring di mana membutuhkan kehadiran fisik di sekolah karena beberapa alasan yang menyebabkan ketidaksiapan daerah untuk melaksanakan sistem daring.

"Tentu saja sesuai dengan yang diperintahkan oleh Bapak Presiden bahwa dalam pelaksanaan PPDB, jika tidak dapat menghindari pertemuan langsung maka untuk metode luring harus memperhatikan protokol kesehatan seperti penyediaan masker dan hand sanitizer, menjaga jarak, dan tidak melakukan kerumunan," tegas Chatarina.

"Oleh karena itu dalam metode luring kami harapkan kesiapan pemerintah daerah untuk jauh-jauh hari menyampaikan pelaksanaan PPDB nya secara luring sehingga dapat membagi waktu pendaftaran agar tidak terjadi kerumunan yang akan menyulitkan pendaftar untuk menjaga jarak," imbuhnya.

KR-Istimewa

Meski dengan online, namun Disdikpora DIY memberikan kesempatan dialog terkait tahapan PPDB dengan protokol kesehatan.

Penerapan Protokol Kesehatan

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY, Didik Wardaya di Yogyakarta mengemukakan, penerapan protokol kesehatan menjadi penting, termasuk dalam pelaksanaan PPDB SMA dan SMK di DIY.

"Layanan pendidikan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan tetap menaati protokol kesehatan. Kalau untuk awal tahun ajaran baru sesuai jadwal yang ada di kalender akademik akan dimulai 13 Juli. Kendati demikian, untuk proses pembelajaran tatap muka akan mempertimbangkan kondisi (penyebaran Covid-19). Jadi kalau tidak memungkinkan tatap muka akan menggunakan daring," terang Didik.

Dijelaskan pula, saat ini tahapan dalam proses PPDB sudah dimulai, di antaranya pengurusan penambahan nilai non-akademik bagi calon siswa yang memilih jalur prestasi dan Kelas Khusus Olahraga (KKO). Pelaksanaan PPDB yang berlangsung di tengah pandemi Covid-19 lebih banyak menggunakan metode daring untuk menghindari kerumunan.

"Pelaksanaan PPDB di tengah pandemi Covid-19 memang membutuhkan persiapan ekstra, khususnya yang berkaitan dengan protokol kesehatan," terang Didik.

Menurut Didik, kualitas sekolah yang ada di DIY sudah cukup merata. Ia meminta orangtua untuk tidak perlu memaksakan agar anaknya masuk ke sekolah tertentu. Jika dipaksakan, Didik khawatir justru akan merugikan siswa.

Sementara itu salah satu orangtua siswa yang anaknya baru lulus dari SMP 16 Yogyakarta, Hasan menyatakan, tidak adanya ujian nasional (UN) SMP menjadikan alat seleksi masuk SMA/SMK diganti dengan nilai gabungan rapor. Kondisi tersebut menuntut kecermatan tersendiri dari orangtua dalam menentukan sekolah bagi anaknya. Oleh karena itu, selain memastikan anaknya memilih sekolah yang ada di zona 1 dirinya juga terus berupaya untuk memantau perkembangan nilai.

"Sesuai dengan arahan dari Disdikpora DIY dalam tahapan pendaftaran, kami diminta untuk memanfaatkan model online. Terus terang dengan adanya revisi Juknis dalam PPDB zonasi, khususnya berkaitan dengan penghitungan nilai gabungan sempat membuat saya was-was, karena seleksi jadi semakin ketat," ungkap Hasan.

Ketua Forum Komunikasi Pengurus OSIS (FKPO) DIY, Muhammad Hanif Wicaksono menilai, pandemi Covid-19 ini menjadikan ujian tambahan bagi siswa. Artinya, ujian itu tidak semata-mata menguji kemampuan para siswa dalam mengikuti pelajaran daring saja, seberapa ilmu yang dikuasai dalam kondisi terbatas, tetapi juga ujian yang lain, seperti kejujuran, mental hingga ujian pada diri untuk menjaga kesehatan.

"Ketika kita mengalami keterbatasan dalam menggali ilmu, saat pandemi, tetapi kita malah mendapat ilmu lain, termasuk ilmu dalam membangun karakter yang tangguh dalam menghadapi ujian hidup, hingga pengetahuan menjaga kesehatan yang baik, termasuk pengetahuan tentang Covid-19 itu sendiri," kata siswa SMA Negeri 1 Teladan Yogyakarta itu.

Meski demikian, Hanif berharap pandemi ini segera berlalu, sehingga aktivitas tatap muka bisa dilakukan kembali. Ia sendiri juga rindu dengan suasana sekolah seperti sebelum pandemi. "Saya rindu suasana kebersamaan dan kekompakan di sekolah. (Kalau di sekolah) aktivitas akademik dan non-akademik bisa (berlangsung) lebih baik lagi (daripada di rumah). Karena aktivitas non-akademik juga membutuhkan tatap muka. Demikian juga dalam hal kegiatan kesiswaan," tutur Hanif. **(Ati/Ria)-f**